

Abstract

Rising political polarization is an increasing concern in the U.S. these days. It results in a higher degree of government dysfunction as well as social divide. This research is to highlight political polarization as an inevitable trait of American domestic politics as well as its impact on its democratic institution.

Using a structural approach, the thesis analyzes the history of political polarization, particularly during the Civil War era and the civil rights movement in relation to the core idea of republicanism and democracy embedded within the American Creed. The research shows that the prevalence of racism and slavery in the South prevented the creation of a unified national narrative on universal rights towards black people, resulting in an era of discrimination. The Voting Rights Act of 1964, which ended the political alienation of black people, also have a great impact on accelerating polarization, with the creation of a more ideologically coherent parties and the use of hostage-taking politics happened following its passing. Thus, the normalization of hostage-taking politics, authoritarianism, and disinformation – things we can find in the Trump era – becomes the norm for gaining power in Washington, at the expense of American democratic institution.

Keywords: American Creed, authoritarianism, democratic backsliding, political polarization, Donald Trump

Abstrak

Meningkatnya polarisasi politik menjadi kekhawatiran terkini di Amerika Serikat. Fenomena ini berimplikasi pada peningkatan disfungsi pemerintah dan kesenjangan sosial. Penelitian ini berupaya untuk menyoroti polarisasi politik sebagai karakteristik yang melekat pada politik domestik Amerika dan dampak fenomena tersebut terhadap insitusi demokrasinya.

Dengan menggunakan pendekatan struktural, penelitian ini menganalisis sejarah polarisasi politik, khususnya selama era Perang Saudara dan gerakan hak-hak sipil dalam kaitannya dengan ide inti republikanisme dan demokrasi yang tertanam di dalam Kredo Amerika. Penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi rasisme dan perbudakan di Selatan mencegah terciptanya narasi nasional tunggal tentang hak-hak universal terhadap orang kulit hitam, yang menghasilkan era diskriminasi. Undang-Undang Hak Pilih 1964, yang mengakhiri alienasi politik orang kulit hitam, juga memiliki dampak besar pada percepatan polarisasi, dengan lahirnya partai-partai yang lebih koheren secara ideologis dan penggunaan politik penyanderaan yang terjadi setelah pengesahannya. Momen historis ini mengarah pada normalisasi politik penyanderaan, otoritarianisme, dan disinformasi – hal-hal yang dapat ditemukan di era Trump – yang menjadi norma untuk mendapatkan kekuasaan di Washington, dengan mengorbankan institusi demokrasi Amerika.

Kata-kata kunci: Kredo Amerika, otoritarianisme, kemunduran demokrasi, politik penyanderaan, Donald Trump.